

CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGUNG
8.D TRIWULAN I TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DPRKPLH		PERANGKAT DAERAH : DPRKPLH										PERANGKAT DAERAH : DPRKPLH										PERANGKAT DAERAH : DPRKPLH										PERANGKAT DAERAH : DPRKPLH										PERANGKAT DAERAH : DPRKPLH									
No	Program	No	Indikator Kinerja	Sasaran	Target Kinerja					Realisasi Kinerja		Capaian % d. TW I 2025	Kriteria Penilaian Realisasi	Ruang Peningkatan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Uraian Kegiatan																																		
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024							2025	ST	T	S	K	SR																												
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)																																																			
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI																																																			
		1	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,11	3,22	3,33	3,44	3,55	3,65	3,76	0,80	0,85	25,39	V		Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100 % Penyediaan dan pengalihan lumpur tinja pada PPT pada TW I sejumlah 123 rumah tangga Penerapan pembangunan SPALIS melalui anggaran DAK Bidang Sanitasi sebanyak 250 unit yang tersebar di 5 Lokasi	Pembangunan sistem pengolahan air limbah rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2025 masih sama dengan tahun 2025 karena proses baik belum tercapai	Capaian cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2025 masih sama dengan tahun 2025 karena proses baik belum tercapai	Plaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun																															
Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman											2224	2257																																							
Jumlah seluruh rumah tangga											278809	278909																																							
ASPEK DATA SAING																																																			
		2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	96,31	96,37	96,43	96,49	96,55	96,6	96,66	96,70	96,70	100	V		Jumlah rumah dengan akses hunian layak dibagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Temanggung dikalikan 100% Peningkatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bersisi dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD Mengunjungi kegiatan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah, melalui pendanaan APBN program BSFS, bantuan CSR dan bantuan Basmas	Keterbatasan APBD dalam penanganan RT/LH hanya mengandalkan bantuan masyarakat baik dari segi SDM, Sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Keterbatasan APBD dalam penanganan RT/LH hanya mengandalkan bantuan masyarakat baik dari segi SDM, Sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah																															
Jumlah rumah dengan akses hunian layak											212422	212422																																							
Jumlah rumah di Kabupaten Temanggung											219675	219675																																							
Jumlah Indikator Kinerja Daerah (IKD)		2	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD										62,69	1	0	0	0	1																																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKUMIHAN																																																			
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																																																			
		1	Nilai IKM Perangkat Daerah		78,14	78,50	79,00	79,5	80,00	80,5	81,00	85,67	85,67	100	V		Nilai IKM diambil dengan rumus SKM = total nilai per unsur dibagi total unsur yang tertera * Nilai Penimbang, hasilnya dikoreksi dengan rumus IKM = SKM * 25	Adanya layanan langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh DPRKPLH antara lain layanan pemantauan dan penyediaan lumpur tinja serta pelayanan pemukiman Rusunawa yang selanjutnya dilaksanakan secara mandiri terkait kualitas pelayanan	Keterbatasan anggaran dalam penanganan RT/LH hanya mengandalkan bantuan masyarakat baik dari segi SDM, Sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah																															
		2	Nilai AKIP Perangkat Daerah		71,9	74,50	75,00	75,5	76,00	76,5	77,00	74,90	74,90	100	V		Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat atau tim evaluasi atau 4 komponen yaitu: Perencanaan Kinerja (SAKIP), Pelaksanaan Kinerja (SKP), Pelaporan Kinerja (SKL), dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kepuasan terhadap regulasi serta komitmen dari pimpinan terkait dengan seluruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Belum optimalnya pelayanan	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat																															
Uraian Wajah yang Berkaitan Pelayanan Dasar																																																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKUMIHAN																																																			
		1	Persentase penyelenggaraan insfrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	70,83	71,7	72,47	73,24	74,01	74,78	75,29	71,11	71,12	98,13	V		Peningkatan nilai rata-rata capaian indikator program dalam penyelenggaraan insfrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan seluruh capaian masing-masing indikator program, kemudian dibagi dengan jumlah indikator yang digunakan	Dukungan anggaran DAK Bidang Sanitasi untuk penyediaan insfrastruktur dasar seperti SPALIS dan TPS 3R Dukungan anggaran APBD dan CSR untuk kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025	Keterbatasan anggaran APBD dalam penanganan RT/LH hanya mengandalkan bantuan masyarakat baik dari segi SDM, Sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah																															
Nilai rata-rata capaian indikator program dalam penyelenggaraan insfrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman											71,11	71,12																																							
INDIKATOR PROGRAM																																																			
URUSAN PEMERINTAHAN WABD YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKUMIHAN																																																			
		1	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V		Jumlah Rusunawa yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dibagi jumlah Rusunawa di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%	Kemauan Rusunawa masih terdapat masalah, baik layanan listrik maupun air masih dapat terakumulasi dan terkendala	Terbatasnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan Rusunawa	Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan Rusunawa dengan alokasi anggaran yang ada berdasarkan skala prioritas dan tingkat kerendahan ringan																															
Jumlah Rusunawa yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik											6	6																																							
Jumlah Rusunawa di Kabupaten Temanggung											6	6																																							
		2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V		Jumlah rumah korban bencana yang terdampak dibagi jumlah seluruh rumah korban bencana dikalikan 100%	Tidak ada korban bencana yang mengakibatkan relokasi	Penyediaan lahan relokasi masing-masing langkah mitigasi bencana pada area rawan bencana dan dukungan dari pihak Pemerintah Desa																																
Jumlah rumah korban bencana yang terdampak											0	0																																							
Jumlah seluruh rumah korban bencana											0	0																																							
		3	Persentase warga negara yang terencana relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V		Jumlah rumah terencana relokasi yang terdampak dibagi jumlah seluruh rumah yang terencana relokasi dikalikan 100%	Tidak ada program pemerintah daerah yang menyebabkan relokasi rumah	warga calon penerima harus memiliki tanah untuk relokasi serta kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah																																
Jumlah rumah terencana relokasi yang terdampak											0	0																																							
Jumlah seluruh rumah yang terencana relokasi											0	0																																							
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)																																																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKUMIHAN																																																			
		4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	96,31	96,37	96,43	96,49	96,55	96,6	96,66	96,70	96,70	100	V		Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dibagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Temanggung dikalikan 100% Peningkatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bersisi dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD, mengunjungi kegiatan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah, melalui pendanaan APBN program BSFS, bantuan CSR dan bantuan Basmas	Keterbatasan APBD dalam penanganan RT/LH hanya mengandalkan bantuan masyarakat baik dari segi SDM, Sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah																																
Jumlah rumah dengan akses hunian layak											212422	212422																																							
Jumlah rumah di Kabupaten Temanggung											219675	219675																																							
		5	Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,8	48,8	48,81	48,82	48,83	48,84	48,85	48,80	48,80	100	V		Luasan kawasan kumuh yang tertangani dibagi luas seluruh kawasan kumuh dikalikan 100%	Kondisi kumulatif di Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori kumuh sedang dan ringan, penanganan kumuh dari anggaran pusat dan provinsi untuk lokasi kawasan kumuh sesuai kewenangannya	Keterbatasan anggaran APBD dalam penanganan RT/LH hanya mengandalkan bantuan masyarakat baik dari segi SDM, Sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Mengoptimalkan penggunaan anggaran dari berbagai sumber																															
Luasan kawasan kumuh yang tertangani											86,30	86,30																																							
Luas seluruh kawasan kumuh											176,836	176,836																																							

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Akhir 2024	Target Kinerja					Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi					Rumus Penghitungan Indikator	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Target Kinerja 2026 dan Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2020	2026	2026	4.4	TW I	2026	SI				
		6	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	64,7	66,88	69,06	71,24	73,42	75,6	77,78	68,38	68,38	99,02	V		Jumlah Akumulasi Penanganan RTLH dan Tahun 2020-2025	Penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berasal dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD, mengabdikan kegiatan pada Diperoleh Provinsi Jawa Tengah, melalui penanaman APHN program BPSB, bantuan CSR dan bantuan Bhamas	Keterbatasan APBD dalam penanganan RTLH hanya mengandalkan bantuan masyarakat Jawa Tengah, penanaman APHN program BPSB, bantuan CSR dan bantuan Bhamas	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi penanganan dengan Dinas Perumahan Provinsi Jawa Tengah, penanaman APHN program BPSB, bantuan CSR dan bantuan Bhamas	
			Jumlah RTLH Tahun 2020									15687	15687								
		7	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	79,82	79,93	80,03	80,14	80,24	80,35	80,45	78,79	78,79	98,45	V		Jumlah rumah tangga yang memiliki rumah	Kemampuan masyarakat dalam menyediakan rumah layak huni secara mandiri	Rumah tangga baru memiliki rumah pribadi (tidak menumpang orang tua)	Mendukung pengembang perumahan dalam menyelenggarakan rumah baru dan subsidi	
			Jumlah rumah tangga yang memiliki rumah									219675	219675								
			Jumlah rumah tangga yang memiliki rumah									219675	219675								
		8	Persentase Reformasi Agraria yang Difasilitasi	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V		Jumlah tanah yang sudah difasilitasi dalam program reformasi agraria dibagi jumlah tanah yang direncanakan untuk difasilitasi dalam tahun n dikalikan 100%	Adanya koordinasi lintas sektor	Ketidakhadiran masyarakat	sosialisasi	
			Jumlah tanah yang sudah difasilitasi dalam program reformasi agraria									24	15								
			Jumlah tanah yang direncanakan untuk difasilitasi dalam tahun n									24	15								
		9	Persentase Terselenggaranya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V		Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah difasilitasi dibagi jumlah rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikalikan 100%	Adanya koordinasi lintas sektor		Sosialisasi dan mediasi sejak awal program	
			Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah difasilitasi									3	0								
			Jumlah rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum									3	0								
JUMLAH IKUPD			3	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD								99,33	3	0	0	0	0				
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			9	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM								99,72	9	0	0	0	0				
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN			12	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIMAN								99,53	12	0	0	0	0				
INDIKATOR PROGRAM																					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																					
INDIKATOR PROGRAM																					
			Peningkatannya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																		
		1	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)			8,06	13,06	18,06	23,06	28,06	30,46	0,80	0,85	6,47	V		Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman dibagi jumlah rumah tangga dikalikan 100%	Pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik sesuai SNI	Capaian cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2025 menurut adanya perubahan metode perhitungan sesuai ketentuan Bappenas pada hasil analisis Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	Penggunaan kegiatan perencanaan/pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi	
			Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman									2234	2357								
			Jumlah seluruh rumah tangga									278809	278809								
		2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	V		Jumlah total warga negara yang terlayani dibagi jumlah total warga negara yang harus dilayani dikalikan 100%	Penyediaan dan pengolahan lumpur tinja pada PLT	Keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan sistem pengolahan air limbah domestik	Penggunaan kegiatan perencanaan/pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi	
			Jumlah total warga negara yang terlayani di tahun n									822880	822880								
			Jumlah total warga negara yang harus dilayani di tahun n									822880	822880								
		3	Persentase jumlah TPS 3R	%	15,57	16,96	17,3	17,63	17,99	18,34	18,69	17,65	17,65	100	V		Jumlah TPS 3R di Kabupaten Temanggung	Pembangunan TPS 3R pada tahun 2025 sebanyak 5 unit	Facilitasi pengujian pemukiman bantuan pembangunan TPS 3R		
			Jumlah TPS 3R di Kabupaten Temanggung									51	51								
			Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung									289	289								
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			3	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM								68,82	2	0	0	0	1				
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								68,82	2	0	0	0	1				
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)																					
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI																					
		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	68,25	75,46	75,5	75,54	75,59	75,63	75,68	72,54	72,54	96,08	V		IKHL = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL)	Sinergi dengan Kementerian LH dalam Pengujian Kualitas Udara	Perubahan Regulasi tentang IKHL menurunkan hasil indeks Kualitas Udara	Melaksanakan kegiatan untuk Meningkatkan Kualitas Air Sungai dengan pengawasan dan pembinaan usaha/kegiatan	
			Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup									72,54	72,54								
		2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO ₂ e	690.921,63	793.727,99	1.129.065,77	1.464.403,55	1.799.741,3	2.135.079,1	2.470.416,89	709.905,71	713.957,59	63,23	V		Perhitungan berdasarkan aplikasi Akara	Pembangunan dan Operasionalnya Sharpas yang berpotensi menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca seperti TPS3R, Bank Sampah, SPALD-T	Diperlukan penambahan data potensi penurunan emisi dari Sektor lain seperti Pertanian, Perhubungan, Bahan dan lain/kegiatan	Penambahan aksi mitigasi yang akan di hitung kedalam aplikasi Akara Bappenas, Sinergitas sektor OPD, Diperlukan Tenaga ahli dalam pengumpulan data sebagai target tercapai	
		3	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	32,98	33,34	34,14	34,94	35,74	40	45	33,84	32,02	93,80	V		Jumlah sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dibagi jumlah total timbulan sampah dikalikan 100%	Bertambahnya fasilitas pengolahan sampah seperti TPS 3R dan meningkatnya pengelolaan sampah di fasilitas yang sudah ada	Terdapat beberapa TPS3R yang tidak berfungsi optimal	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPS3R dan TPSD	
			Jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah									50819,26	11889,49								
			Jumlah total timbulan sampah									150175,6	37126,85								
		4	Cakupan pelayanan persampahan	%	74,39	76,12	77,85	79,58	81,31	83,04	84,78	76,47	76,47	98,23	V		Jumlah desa yang terlayani dibagikan jumlah total desa dan kelurahan dikalikan 100%	Terdapat penambahan jumlah desa yang melakukan pengangkutan sampah secara mandiri ke TPA		Koordinasi dengan desa yang belum melaksanakan pengelolaan sampah	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan									221	221								
			Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung									289	289								
JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)			4	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD								87,84	3	0	0	1	0				
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																					
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar																					
			Lingkungan Hidup																		
		1	Indeks Kualitas Air	Angka	59,63	74,17	74,27	74,37	74,47	74,57	74,67	74,71	74,71	100	V		Nilai Indeks Kualitas Air di Kabupaten Temanggung	Tersedianya anggaran UJ dan TI	Pengujian Kualitas Air direncanakan pada akhir semester I	Melaksanakan kegiatan untuk Meningkatkan Kualitas Air Sungai dengan pengawasan dan pembinaan usaha/kegiatan	
			Nilai Indeks Kualitas Air									74,71	74,71								

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Berkas Akhir 2024	Target Kinerja					Realisasi Kinerja		Kategori	Kriteria Penilaian Realisasi					Rumus Penghitungan Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	*Tipe pencapaian Target Kinerja Tahun 2024 dan										
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2026		≥ 80	70-79	60-69	50-59	40-49					30-39	20-29	10-19	0-9						
		16	Persentase sampah yang terkelola	%	62,91	63,27	64,07	64,87	65,67	65,47	67,27	63,28	62,80	98,02	V						Jumlah sampah terkelola dibagi jumlah total timbulan sampah dikalikan 100%	Bertambahnya fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R dan meningkatnya pengelolaan sampah di fasilitas yang sudah ada	Terdapat beberapa TPS 3R yang tidak berfungsi optimal	Terdapat bank sampah yang tidak terdorong pengelolaan sampahnya	Monitoring dan evaluasi keberlanjutan TPS 3R dan TPSD	Sosialisasi pengelolaan sampah dari sumber	Facilitasi pengajuan permohonan bantuan sarana pengelolaan sampah	Koordinasi dengan desa yang belum melaksanakan pengelolaan sampah				
						Jumlah Timbulan Sampah Terkelola (ton)					95024,02	23315,86																				
						Jumlah Timbulan Sampah (ton)					150173,6	37126,85																				
		17	Cakupan Pelayanan persampahan	%	74,39	76,12	77,85	79,58	81,31	83,04	84,78	76,47	76,47	98,23	V						Jumlah desa dan kelurahan yang terlayani dibagi jumlah total desa dan kelurahan dikalikan 100%	Terdapat penambahan jumlah desa yang melakukan pengangkutan sampah secara mandiri ke TPA					Koordinasi dengan desa yang belum melaksanakan pengelolaan sampah					
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan					221	221																				
						Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung					289	289																				
JUMLAH IKUPD				3	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD											84,69	2	0	0	1	0											
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				17	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM											70,85	11	1	0	0	5											
JUMLAH INDIKATOR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				28	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											77,77	13	1	0	1	5											
JUMLAH IKD				6	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD											79,46	4	0	0	1	1											
JUMLAH TOTAL IKUPD				6	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD											92,01	5	0	0	1	0											
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PROGRAM				29	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM											79,80	22	1	0	0	6											
JUMLAH TOTAL INDIKATOR DIFEKSI				35	RATA-RATA CAPAIAN DIFEKSI											85,01	27	1	0	1	6											

Kriteria Penilaian Realisasi	Status
Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
Tinggi	76% ≤ 90%
Sedang	60% ≤ 75%
Rendah	51% ≤ 65%
Sangat Rendah	≤ 50%

IKD

79,46